

## **BAB II**

### **SEJARAH DAN DINAMIKA KONFLIK SEPARATIS DI THAILAND SELATAN**

Konflik wilayah selatan Thailand yang dihuni oleh mayoritas etnis melayu disebabkan karena ketidakpuasan dari penduduk lokal dan banyaknya ketimpangan sosial, politik, ekonomi yang terjadi mengakibatkan adanya keinginan untuk mempunyai otoritas sendiri untuk mengatur wilayahnya. Keinginan tersebut ditunjukkan dengan adanya gerakan-gerakan separatis dan pemberontakan dari masyarakat yang merasa dirugikan.

Bab ini terbagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama membahas mengenai latar belakang konflik separatis di Thailand Selatan. Bagian kedua membahas mengenai faktor munculnya gerakan separatis Patani. Bagian ketiga membahas mengenai dinamika konflik separatis Thailand Selatan.

#### **2.1 Latar Belakang Konflik Separatis di Thailand Selatan**

Thailand berbatasan langsung dengan Laos dan Kamboja di timur, Malaysiadan Teluk Siam di selatan, dan Laut Andaman di barat. Ada beberapa wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia di selatan seperti Narathiwat, Patani dan Yala memiliki masih memiliki sejarah dan kebudayaan melayu yang kuat, sehingga berbeda dengan mayoritas penduduk Thailand lainnya (Mc Cargo,2010).

Pada awalnya wilayah Thailand Selatan seperti Narathiwat, Patani dan Yala merupakan bagian dari kerajaan Melayu Patani yang yang menjadi salah satu pusat

perdagangan yang memiliki cakupan cukup luas dan padat di semenanjung Laut Cina Selatan. Namun, pada 1902 pada masa kemunduran kerajaan Melayu Patani disepakati traktat Anglo-Siam antara pemerintah Siam dan Inggris, yang berisikan bahwa wilayah Patani Raya bukan merupakan kerajaan tersendiri lagi, tapi menjadi wilayah kerajaan Siam (Thailand) (Yuniarto,2005:5).

Saat diperintah oleh Perdana Menteri Phibun Songgram (1938-1944) upaya integrasi wilayah nasional kerajaan di implementasikan melalui sistem politik ultra-nasionalis. Penggabungan politik ini dilakukan melalui kebijakan konsolidasi wilayah bangsa Melayu untuk kepentingan integrasi(Yuniarto, 2005:6). Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah konsolidasi administrasi yang dirancang untuk mengintegrasikan wilayah-wilayah bangsa Melayu ke dalam sistem politik nasional Kerajaan Siam yang dipusatkan di Bangkok. Sejalan dengan kebijakan ini, pemerintah juga melakukan kebijakan integrasi ekonomi yang bertujuan mengelola provinsi-provinsi ini agar mampu membiayai pemerintahannya sendiri dan tidak menjadi beban kerajaan (Yuniarto,2004:9).

Di samping menerapkan kebijakan pemerintahan sentralistik, pihak kerajaan Siam menerapkan identitas nasional dengan semboyan trinitas (*eta lak thai*) yang hanya mengakui satu kebangsaan bangsa Thai, satu agama Buddha, dan tunduk para kekuasaan Raja (Yuniarto,2005:92). Dari dimensi sosial budaya, identitas semacam ini dapat dilihat sebagai bentuk pemaksaan ideologi yang dapat mencabut masyarakat Muslim Patani dari tradisi dan identitasnya. Karena diluar tiga unsur tersebut kemudian tidak dianggap signifikan dalam urusan campur tangan kekuasaan maupun

dalam penentuan kebijakan negara(Yuniarto,2005:92).Etnis Patani yang tidak menginginkan adanya pencampuran kultur Budha dan Islam, menyebabkan munculnya keinginan untuk mendirikan Patani Raya (Lubis, 2002:3).

Pada bulan April 1947, Haji Sulong yang merupakan tokoh penting gerakan separatis Patani mengajukan lima tuntutan kepada kerajaan Thai yaitu: menuntut otonomi politik untuk semua wilayah melayu Patani, mendesak kerajaan Thai mengangkat seorang gubernur dari kalangan Melayu Patani untuk menjalankan pemerintahan kolektif terhadap empat daerah di selatan yang mayoritas penduduknya adalah orang melayu, meminta agar bahasa Melayu diakui sama statusnya dengan bahasa Thai dan digunakan sebagai bahasa pengantar bagi sekolah dasar di wilayah selatan Thai, mendirikan Mahkamah Islam untuk menjalankan Undang-Undang Syariah, menggunakan hasil sumber daya alam daerah-daerah Melayu untuk percepatan pembangunan di wilayah tersebut (Christie,1996:182).

Permintaan Haji Sulong menuntut hak otonomi untuk memerintah daerah-daerah Melayu ini menyebabkan pihak militer Thai menangkap Haji Sulong dan bawahannya dengan tuduhan penghasutan (*sedition*) pada Januari 1948(Christie,1996:182). Oleh karena itu, kebijakan integrasi Kerajaan Siam mendapat tantangan keras dari masyarakat dan menimbulkan perlawanan separatisme.

Organisasi pertama yang muncul akibat perlawanan separatisme adalah Gabungan Melayu Pattani Raya (GEMPAR), sebuah organisasi politik yang didirikan pada tahun 1948, dengan tujuan menyatukan kaum Melayu di Patani, Yala dan

Narathiwat untuk menuntut kemerdekaan dari Siam (Fitra,2016:6). Pada tahun 1959, Tengku Abdul Jalil pengikut Haji Sulong mendirikan front perlawanan bawah tanah yaitu *National Liberation Front* (NLF). Kelompok ini tidak hanya menuntut otonomi seperti sebelumnya tetapi lebih bergeser pada tuntutan kemerdekaan dan mendirikan negara Islam. Seiring dengan jatuhnya harga timah dan karet yang menjadi andalan perekonomian masyarakat daerah saat itu, masyarakat Patani mulai menyadari pemerintah mengeksploitasi sumber daya alam dan potensi ekonomi lainnya tanpa memberikan kontribusi yang adil (Forbes, 2004).

Masuknya pengaruh dan elemen eksternal sepanjang tahun 1970-an telah membawa implikasi besar terhadap skenario politik internal di wilayah Thailand Selatan. Golongan pemuda yang mendapat pendidikan dari di Timur Tengah, Pakistan dan Malaya telah memperkenalkan ide-ide pembaharuan islam dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi gerakan perjuangan Patani saat itu (Suhrke, 1975:25). Sementara itu, golongan sekuler yang mendirikan front perlawanan yang berbeda karena perbedaan ideologi yaitu *Patani Union Liberation Front* (PULO), sebagai pemerintahan bawah tanah. Walaupun secara ideologi berbeda, kedua front perlawanan ini memiliki kesamaan dalam melihat posisi pemerintah Thailand sebagai *internal colonization* yang sulit untuk berkompromi. Selain itu, mereka tidak berorientasi pada kejayaan masa lalu seperti golongan aristokrasi tradisional yang menuntut kemerdekaan sepenuhnya (Suhrke, 1975:26).

Gerakan perlawanan yang muncul dipahami sebagai salah satu upaya mempertahankan identitas nilai keagamaan dan etnisitas mereka dengan menuntut

diberhentikannya sikap diskriminatif kerajaan Thai. Identitas lama yang masih berada dalam bayangan kejayaan Patani mulai menunjukkan perubahan dengan diajukannya hak-hak otonomi mereka dalam masyarakat berbangsa yang lebih besar. Penyebabnya karena Patani dianggap sebagai minoritas dan daerah taklukan kerajaan Siam, untuk itu masyarakat Patani tetap berupaya mempertahankan hak-hak otonomi dan identitas sosial mereka sebagai masyarakat dengan nilai-nilai keislaman yang dianut oleh sebagian besar masyarakat (Pathan, 2010:5).

Dari sini dapat disimpulkan bahwa gerakan etno-nasionalis di Thailand Selatan terjadi karena Etnis Patani tidak menyetujui kebijakan asimilasi yang dilakukan oleh Kerajaan Thai, yang menggantikan identitas agama dan kultural etnis melayu muslim dengan ideologi nasional Thailand yaitu “Bangsa, Agama dan Raja”. Gerakan etno-nasionalis ini dipelopori oleh Haji Sulong dan diikuti oleh beberapa organisasi seperti Gabungan Melayu Pattani Raya (GEMPAR), *National Liberation Front* (NLF), dan *Patani Union Liberation Front* (PULO).

## **2.2 Faktor Munculnya Gerakan Separatis Patani**

Menurut Fisher (2001) kemunculan konflik disebabkan oleh karena adanya identitas yang terancam, berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak dapat diselesaikan. Gerakan separatis merupakan bentuk perlawanan budaya akibat adanya sikap diskriminasi. Wyatt (1967) menyatakan bahwa munculnya gerakan separatis Pattani dilatarbelakangi beberapa hal: pertama, sejarah penaklukan oleh Siam. Pattani dahulu merupakan kerajaan yang kuat dan

berkembang sebagai salah satu pusat perdagangan di Asia. Namun, dengan adanya penaklukan oleh Siam diikuti dengan banyaknya kebijakan dan tata pemerintahan baru yang sangat berbeda dengan sebelumnya ditambah adanya benturan kepentingan, maka muncullah gerakan separatis (Yuniarto,2005:98). Kedua, kepentingan ekonomi. Wilayah selatan yang cukup kaya akan sumber daya alam terutama minyak bumi dianggap tidak dapat menikmati hasil sebagaimana orang pribumi. Akses ekonomi hanya dinikmati komunitas lain. Ketiga, migrasi internal. Adanya program migrasi internal dengan kebijakan pemindahan paksa seluruh penduduk Melayu Muslim ke Selatan mengakibatkan adanya kesenjangan ekonomi dan juga kesenjangan politik antara komunitas Muslim Melayu Thailand dengan komunitas non-muslim (Yuniarto,2005:98).

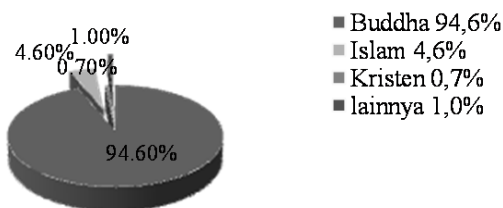
Adapun faktor-faktor penyebab gerakan separatis di Thailand Selatan dapat dibedakan menjadi faktor sosial, faktor politik dan faktor ekonomi. Secara sosial, terancamnya otonomi budaya etnik Melayu-Muslim sejak terbentuknya sistem administrasi provinsi dan terpusat, diterapkannya asimilasi serta sekularisasi sekuler menyebabkan adanya penyatuan simbol-simbol kultural dengan diberlakukannya sistem pendidikan sekuler. Pemerintah pusat mewajibkan bahasa pengantar di sekolah-sekolah menggunakan bahasa Thai dan pelarangan bahasa Melayu (Sihbudi, 2000:15). Faktor inilah yang menjadi ciri utama sekaligus dasar perjuangan bagi pemisahan diri kaum Melayu-Muslim di Thailand Selatan.

Secara politik, adanya keinginan untuk mendapatkan hak otonomi dalam berbagai bidang selain dalam keagamaan, juga dalam hal kebudayaan, hukum, dan

membentuk pemerintahan yang otonom, dengan adanya dominasi elit politik di pemerintahan publik dan banyaknya pegawai yang berasal dari pusat mendiskriminasi penduduk setempat yang mayoritas Melayu Muslim (Jitpiromsri, 2006:102).

Jumlah penduduk muslim melayu di Thailand selatan termasuk minoritas dimana hanya 4-5% dari 70 juta jiwa penduduk Thailand (Bappenas,2011). Rakyat Thailand Selatan yang merupakan minoritas, secara etnis dan agama berbeda dengan rakyat Thailand pada umumnya. Kaum Muslim Thai sudah lama berjuang untuk melepaskan diri dari Kerajaan Thailand dan sebagian dari mereka menyatakan keinginan bergabung dengan rakyat Kedah dan Kelantan di Malaysia.

### **Grafik 2-1 Diagram Pemeluk Agama Mayoritas dan Minoritas di Thailand**



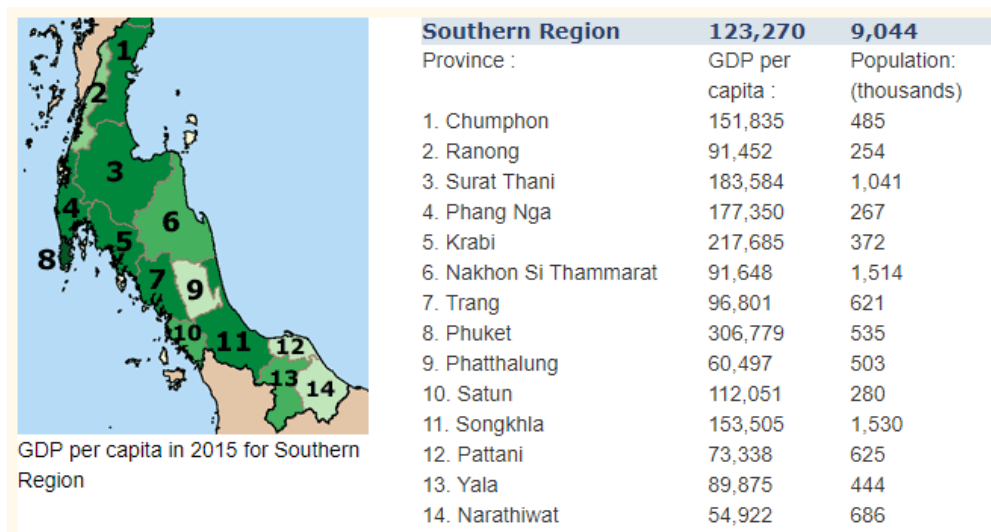
*Sumber:* Arysandi,2012

Dapat dilihat dari statistik diatas, bahwa persentase populasi warga negara Thailand yang memeluk agama Budha mencapai 94,6%, Islam 4,6%, Kristen 0,7%, dan lainnya sebanyak 1,0%. Dengan demikian warga negara Thailand mendominasi masyarakat dan tidak jarang minoritas mendapatkan perlakuan diskriminasi.

Selain masalah agama, situasi di Thailand Selatan juga terdapat masalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan rendah, ketidakmerataan ekonomi dan kekurangan perhatian dari pemerintah pusat. Adanya asimilasi dan dominasi dari pemerintah pusat, semakin mempersulit penduduk Thailand Selatan dalam proses pembangunan dan kesejahteraan. Hal ini dipertegas oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi yang mengatakan bahwa, “*Kemiskinan dan tingkat ekonomi rendah di wilayah selatan menjadi salah satu pemicu terjadinya masalah keamanan*” (Republika, 2007).

Tabel dibawah ini memperlihatkan perbandingan pendapatan perkapita dari wilayah di Thailand Selatan pada tahun 2015.

**Gambar 2.1 Pendapatan Perkapita Rata-Rata Penduduk di Thailand Selatan**

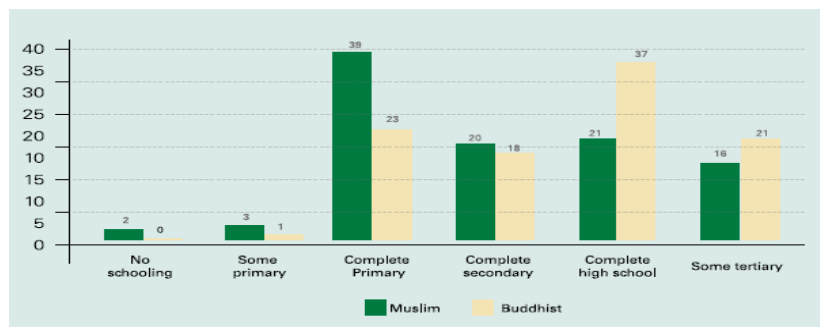


Sumber: National Economic and Social Development Boards, 2015.

Berdasarkan tabel diatas yang diolah dari *National Economic and Development Boards* (NESDB) Thailand, pendapatan perkapita rata-rata dari provinsi Pattani dan Narathiwat di Thailand Selatan termasuk yang terendah di seluruh Thailand, lebih kurang 73 ribu Baht pertahun di provinsi Pattani dan 55 ribu Baht pertahun di provinsi Yala. Selain itu NESDB juga melaporkan bahwa Narathiwat merupakan provinsi termiskin di Thailand Selatan dengan 46% dari populasi berada di bawah garis kemiskinan. Lebih dari 193 ribu orang memperoleh pendapatan bulanan 808 Baht di bawah rata-rata penduduk Thailand lainnya (Pundit, 2015).

Selain masalah kemiskinan, masalah pendidikan rendah juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab gerakan separatis. Berdasarkan data dari *National Scout Organization* (NSO) 69.80% populasi di tiga provinsi di Thailand Selatan hanya menempuh jenjang pendidikan hingga sekolah dasar, dan hanya sekitar 9.20% populasi yang menyelesaikan sekolah menengah.

**Grafik 2.1 Persentase Tingkat Pendidikan Penduduk di Thailand Selatan**



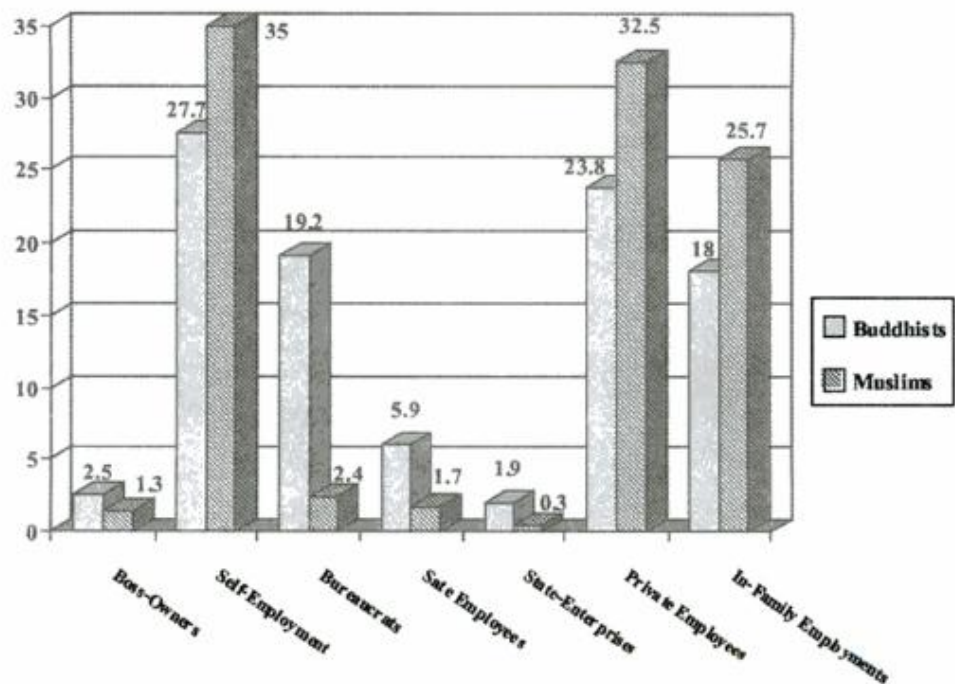
*Sumber:* Pathan, 2010.

Dapat dilihat dari diagram diatas, bahwa persentase populasi warga muslim di Thailand Selatan yang menyelesaikan pendidikan hingga sekolah menengah atas

mencapai 21% dan yang menyelesaikan sekolah diploma sebanyak 16%. Sedangkan populasi Budha yang menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas mencapai 37% dan sekolah diploma sebanyak 21%.

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Thailand Selatan dilatarbelakangi oleh adanya penghapusan pendidikan tradisional melayu oleh pemerintah pusat Thailand yang mengembangkan kebijakan asimilasi dan memasukkan pendidikan semisekuler di lingkungan pondok dan kewajiban penggunaan bahasa Thai dalam proses pembelajaran. Sistem pendidikan seperti ini tidak sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat Thailand Selatan, sehingga terjadi pengurangan semangat untuk memperoleh pendidikan tinggi. Konsekuensinya, sangat sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan posisi di pemerintahan jika tidak mendapatkan pendidikan resmi dari pemerintah dan juga tidak fasih berbahasa Thailand (Abuza,2011:25). Konsekuensinya, Rendahnya pendidikan ini juga pasti akan berdampak pada pengangguran dan juga ketidakmerataan ekonomi.

### **Grafik 2.2 Persentase Kesempatan Kerja Populasi Umat Budha dan Muslim di Thailand Selatan**



Sumber : McCargo, 2006:100.

Dilihat dari tabel diatas dari 766 ribu populasi usia produktif di tiga provinsi Thailand Selatan, hanya sekitar 2,4% yang bekerja di sektor pemerintahan. Hal ini sangat berbeda jauh dengan penduduk budha di Thailand Selatan yang 19,2% bekerja di sektor pemerintahan. Selain itu, 35% populasi muslim bekerja sebagai wiraswasta, rata-rata mereka bekerja di sektor informal seperti pedagang kaki lima, pemilik kedai kopi, atau pengusaha barang bekas. 32,5% populasi muslim lainnya bekerja di perusahaan swasta sebagai pekerja perkebunan karet, pertanian, dan pabrik. 25,7% populasi muslim lainnya bekerja di perusahaan keluarga saat musim tertentu.

Minimnya populasi muslim yang berada pada sektor birokrasi menyebabkan berkurangnya perhatian pemerintah pusat di wilayah Thailand Selatan yang turut

menjadi alasan gagalnya pembangunan ekonomi dan pendidikan (Burke,2013:24). Jika akses terhadap ekonomi sulit dicapai dan pada akhirnya menyebabkan kemiskinan, tentu akan berdampak pula terhadap pencapaian yang lain, misalnya karena tidak ada akses yang mudah terhadap ekonomi maka akan menyebabkan pula sulitnya untuk mengenyam pendidikan.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab gerakan etno-nasionalis Patani dapat dibedakan menjadi menjadi faktor sosial, faktor politik dan faktor ekonomi. Secara sosial, terancamnya budaya etnik Melayu-Muslim karena dibentuknya sistem administrasi terpusat, diterapkannya asimilasi serta sekularisasi sekuler. Secara politik, disebabkan karena adanya diskriminasi dalam dominasi elit politik di pemerintahan. Secara ekonomi, adanya kesenjangan pendapatan, kemiskinan dan pengangguran antara wilayah di Thailand Selatan dan wilayah Thailand lainnya.

## **2.2 Dinamika Konflik Separatis Thailand Selatan**

Konflik Pattani kembali memanas pada awal tahun 2004, dengan adanya penyerbuan terhadap markas militer Distrik Arion di Narathiwat yang menewaskan empat tentara Thailand dan hilangnya 400 senapan lengkap beserta amunisinya (Human Right Watch, 2007). Pada 28 April 2004 lebih dari 100 militan melakukan serangan teroris terhadap lebih dari 10 pos polisi di seluruh provinsi Yala, Patani, Narathiwat dan Songkhla di Thailand Selatan, setelah 7 jam penyerangan 32 militan mundur ke Mesjid Kru-Se yang dianggap oleh penduduk Muslim sebagai Mesjid

tersuci di Patani (Cargo, 2014). Pergerakan ini dianggap sebagai titik kelemahan militan muslim sehingga Jenderal Palloop Pinmanee yang saat itu bertugas sebagai komandan memerintahkan untuk menyerang masjid berikut militan yang bersembunyi di dalamnya.

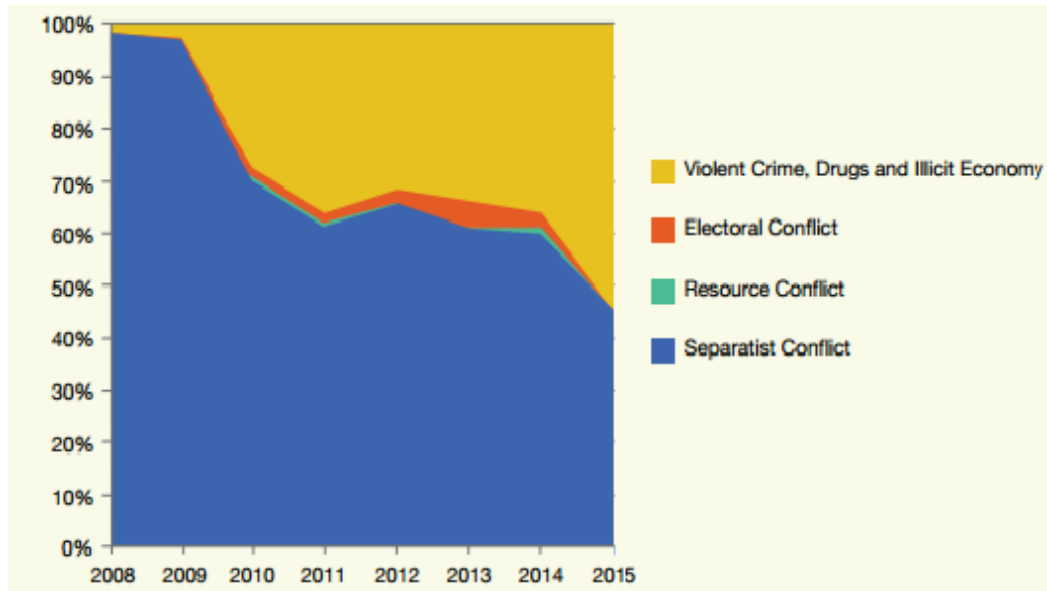
Kebijakan ini dianggap melanggar perintah langsung dari Menteri Pertahanan Chavalit Yongchaiyut untuk mencari solusi damai dan tidak menimbulkan korban jiwa. Namun, perintah itu dilanggar dan Jenderal Pinmanee yang berdalih bahwa mereka hanya melaksanakan tugas karena kekhawatiran bahwa penduduk sipil akan bersimpati ke pemberontak dan terjadi hal yang tidak diinginkan. *The Asian Centre of Human Right* selama investigasi menemukan bukti adanya pelanggaran HAM pada tawanan seperti adanya tanda-tanda tali diikatkan di pergelangan tangan mereka dan bekas ditembak di kepala yang menunjukkan mereka telah dieksekusi sebelum diinvestigasi. Insiden ini mengakibatkan Jenderal Palloop mengundurkan diri dari jabatannya sebagai komandan *Southern Peace Enhancement Centre* (SPEC) (Counter Currents, 2004).

Insiden Kru-Se ini mengakibatkan semakin maraknya aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh militan muslim lainnya, seperti insiden Tak Bai. 25 Oktober 2004, 1.500 demonstran berkumpul di kantor polisi daerah Tak Bai untuk menuntut pembebasan enam orang teman mereka yang terlibat pemberontakan (Melvin, 2007:7-9). Hampir 1.300 demonstran ditahan di tempat demonstrasi dan dilaporkan petugas yang berwenang melakukan pelanggaran HAM. Para tahanan dilaporkan dipaksa ditumpuk dalam truk kepolisian menuju *Inkayut Army Camp*, 78

demonstrasi tewas sesak napas dan cedera serius. Lanjutan dari kasus tersebut, pada November 2004, seorang wakil kepala polisi di Narathiwat ditemukan tewas dan hasil penyelidikan menyimpulkan bahwa kejadian itu merupakan hasil pembalasan dendam atas kematian para demonstran di Tak Bai (Melvin, 2007:11).

Sejak tiga insiden besar selama tahun 2004, pemberontakan sempat menurun. Namun, ratusan aksi protes, perusakan dan juga aksi teror semakin meningkat sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar. Serangan menargetkan kawasan yang ramai penduduk atau daerah yang ramai dikunjungi seperti pasar dan lain sebagainya. Serangan yang terjadi dilakukan dengan melakukan penembakan secara membabi buta untuk menambah korban jiwa dari pihak sipil yang kelompok separatis anggap berpihak kepada pemerintah Thailand. Dari tahun 2004-2008 konflik di Thailand Selatan meningkat karena adanya gejolak dan ketidakstabilan politik pada masa kudeta militer Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Berikut merupakan grafik konflik di Thailand Selatan berdasarkan sumber konflik dari tahun 2008-2015.

**Grafik 2-3 Grafik Jumlah Kematian Berdasarkan Sumber Konflik di Thailand Selatan Tahun 2008-2015**



*Sumber:* Baron, 2016.

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2008 hampir 100% sumber konflik berasal dari gerakan separatis. Namun, konflik separatis sempat menurun drastis pada tahun-tahun berikutnya setelah diadakan perundingan dengan perwakilan kelompok separatis pada 2008. Pada 2012, konflik meningkat karena ketidakpuasan terhadap kebijakan politik dari perdana menteri Yingluck Shinawatra. Pada 2014, setelah kedudukan perdana menteri digantikan oleh Prayut Chan-Ocha, konflik kembali menurun karena kebijakan politik dan militer Thailand difokuskan untuk mengatasi konflik separatis dan anggaran nasional dialokasikan untuk pengembangan wilayah di Thailand Selatan.

Konflik yang terjadi di Thailand Selatan telah menjadikan stabilitas Thailand terganggu. Ketidakpuasan dari kerajaan dan pihak militer terhadap kinerja dan

kebijakan Perdana Menteri dalam menangani ketegangan yang terjadi di Thailand Selatan membuat seringnya terjadi kudeta militer dan pergantian kekuasaan. Tidak hanya itu, kejadian tersebut pun telah memberikan citra negatif dari masyarakat internasional terhadap pemerintahan Thailand (Aphornsuvan, 2010:35).

### **2.3 Respon Internasional terhadap Konflik Separatis Thailand Selatan**

Puncak kekerasan di Thailand Selatan yang terjadi pada tahun 2004 yang ditandai dengan dua peristiwa penting, yakni serangan terhadap Masjid Kru Sepada tanggal 28 April 2004 dan insiden kekerasan di Tak Bai pada tanggal 25 Oktober 2004, telah memakan ratusan korban jiwa, sedangkan sekitar 1.300 orang Muslim ditangkap dan dibawa ke markas militer yang berada di Pattani. Kejadian ini menimbulkan kontroversi besar. Spekulasi mulai bermunculan di antaranya tuduhan kekerasan yang berlebihan, metode yang terlalu keras, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Hal ini menarik perhatian Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Sebagai salah satu organisasi internasional yang berfokus pada hak asasi manusia kelompok minoritas, OKI terlibat dalam konflik yang terjadi antara pemerintah Thailand dengan kelompok separatis Thailand selatan. Atas mandat yang di terima oleh OKI berdasarkan Piagamnya, OKI melindungi hak-hak muslim minoritas dan masyarakat non-anggota, dan untuk menjalankan mandatnya ini, OKI memiliki misi untuk menjaga kelompok minoritas dan komunitas muslim di negara non-anggota dan

melakukan intervensi atas nama perlindungan hak asasi manusia yang berkonsentrasi pada agama yang mengikat muslim secara bersama.

Sekretaris Jenderal OKI saat itu di pimpin oleh Prof Ekhemelden Ihsanoglu mengecam kejadian yang menewaskan 86 dari masyarakat Muslim Patani tersebut. OKI merilis beberapa siaran pers sehubungan dengan kekerasan yang terjadi di Thailand Selatan. Siaran pers tersebut mengutuk berlanjutnya aksi kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dan menyerukan negosiasi dan dialog damai untuk menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam di Thailand. OKI juga menyerukan kepada pemerintah Thailand agar memperlakukan masyarakat Muslim di Thailand Selatan sejajar dengan warga negara yang lainnya (Yusuf, 2006: 20).

Pada tahun 2005, OKI berkunjung ke Thailand Selatan untuk meninjau secara langsung kondisi yang dialami oleh masyarakat Muslim Melayu di wilayah Selatan. Sesuai dengan kerangka kerja yang dimiliki oleh OKI untuk melakukan resolusi konflik, tim delegasi OKI memulainya dengan pengumpulan fakta-fakta. Dari data yang mereka temukan, tim delegasi menyimpulkan bahwa kerusuhan di Thailand bukanlah berakar dari diskriminasi agama. Namun, kerusuhan berakar pada pengabaian budaya wilayah selatan. Hal ini yang sebenarnya memicu konflik hingga terjadi sampai saat ini (OKI Press Release, 2006).

Respons positif diberikan oleh pemerintah Thailand. Dalam jumpa pers yang dilakukan oleh OKI pada 5 November 2006, Sekretaris Jenderal OKI menyambut baik langkah-langkah konstruktif yang diambil oleh Perdana Menteri Thailand,

Surayud Chulanod untuk mencapai tujuan damai dan adil untuk permasalahan Thailand Selatan dengan negosiasi. Perdana Menteri Thailand juga meminta maaf kepada masyarakat Muslim Thailand Selatan atas kesalahan yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya yang banyak memakan korban. Perdana Menteri juga menyelidiki orang hilang sejak kerusuhan tahun 2004. Perdana Menteri bersedia untuk memecahkan masalah atas dasar negosiasi dan melakukan pemulihan Dewan Administrasi Provinsi Selatan (OKI Conference, 2006).

OKI tidak hanya berusaha bersikap koperatif dengan pemerintah Thailand guna mencari solusi untuk Thailand Selatan. Pada tahun 2009, OKI juga berupaya mengikutsertakan kelompok pemberontak ke dalam proses perdamaian. Pertemuan OKI dengan kelompok separatis dimulai dari PULO. Presiden PULO, Al Haj Abu Yasir Fikri diundang ke Kesekretariatan OKI di Kerajaan Arab Saudi pada tanggal 18-19 April 2009 (Pattani Post, 2009). Dalam pertemuan tersebut, perwakilan PULO menyebutkan bahwa untuk memahami permasalahan yang sebenarnya di Thailand Selatan, semua pihak harus melihat akar permasalahan yang lebih mendalam. Thailand melihat wilayah Selatan sebagai bagian wilayahnya, namun gerakan-gerakan pembebasan melihat Thailand sebagai kekuatan kolonial yang menduduki tanah mereka dengan paksa, tidak mengakui keberadaan identitas etnis Melayu, sehingga menimbulkan hambatan yang besar untuk berdampingan hidup secara damai (Pattani Post, 2009).

Setelah mendengarkan pandangan dan komentar dari perwakilan PULO, OKI mengeluarkan rekomendasi pada tanggal 23-25 Mei 2009 di Damaskus, Suriah. Inti

dari rekomendasi tersebut adalah OKI menyayangkan belum adanya kemajuan dari komitmen pemerintah Thailand untuk mengatasi konflik sejak diangkatnya isu Thailand Selatan di konferensi OKI tahun 2006. Sekretaris Jendral OKI juga mengundang negara-negara anggota yang memiliki hubungan kuat dengan Thailand untuk membantu negara tersebut mengimplementasikan secara penuh kesepakatan yang telah terbentuk yang akan memberikan kontribusi dalam mewujudkan perdamaian di Thailand Selatan, dalam hal ini adalah Malaysia yang kedepannya akan menjadi mediator dan fasilitator dalam negosiasi antara pemerintah Thailand dan perwakilan kelompok separatis (Pattani Post, 2009).

Realisasi proses damai dengan mengikut sertakan Malaysia ini dimulai pada tanggal 8 Juni 2009 ketika perwakilan Thailand, Abhisit Vejjajiva pertama kali mengunjungi perwakilan Malaysia, Najib Razak di Malaysia untuk meningkatkan kerjasama dalam mengatasi kekhawatiran di wilayah Selatan. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat untuk memberikan kesempatan kepada para pemuda untuk mencapai perdamaian. Thailand dan Malaysia juga sepakat untuk bekerjasama dibawah naskah yang dikenal dengan naskah tiga E, yakni pendidikan (*education*), pekerjaan (*employment*), dan kewirausahaan (*entrepreneurship*) (Funston, 2010: 248). Pada tahun yang sama, diadakan pertemuan dalam rangka kerjasama antara Thailand dan Malaysia, sekaligus diadakan sidang komite strategi pembangunan daerah perbatasan bersama. Kedua negara juga berusaha keras untuk menciptakan keadaan yang aman, dan menghindari konflik yang akan muncul antara Thailand dan Malaysia.

Pada tahun 2013, Malaysia selaku anggota OKI kembali bertindak sebagai fasilitator antara pemerintah Thailand dengan BRN. Pertemuan ini dilaksanakan tanggal 28 Februari 2013 di Kuala Lumpur. Dalam pertemuan ini BRN memiliki lima tuntutan kepada pemerintah Thailand, yaitu Pengakuan BRN sebagai perwakilan rakyat Muslim Thailand Selatan, Pengangkatan Malaysia sebagai mediator, bukan fasilitator, Keterlibatan negara-negara ASEAN, OKI, dan LSM dalam proses perdamaian, Pengakuan keberadaan dan kedaulatan bangsa Melayu Pattani dan Pembebasan semua pejuang Pattani dari penjara (McCargo, 2014:8).

Upaya OKI untuk mewujudkan kondisi yang lebih stabil di Thailand Selatan terus berlanjut hingga tahun 2015. Pada tahun ini OKI mengeluarkan Resolusi No. 1/42 tahun 2015, yang mana OKI kembali memuji tindakan yang dilakukan antara Sekretaris Jenderal, Pemerintah Thailand, dan perwakilan Muslim Thailand Selatan. Poin Tambahan di resolusi ini terdapat di butir 19, yang menyatakan dukungan OKI untuk kelanjutan proses dialog damai antara Pemerintah Thailand dan perwakilan dari komunitas Muslim di Thailand Selatan dengan Malaysia sebagai fasilitator, dan memanggil kedua belah pihak untuk membangun rasa saling percaya dalam memulai dialog ini (OKI conference,2015).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik Thailand Selatan sudah menarik perhatian dunia internasional, yaitu OKI sebagai orrganisasi kerjasama islam yang berfokus pada ham asasi manusia dan bertujuan untuk menjaga kelompok minoritas. Respon dari OKI disambut baik oleh kedua belah pihak yang bertikai sehingga dilakukannya berbagai negosiasi dengan Malaysia sebagai fasilitator dan mediator.

## **2.4 Kesimpulan**

Gerakan separatis di Thailand Selatan merupakan konflik antara pemerintah Thailand dengan kaum minoritas Thailand yaitu etnis muslim melayu yang menuntut kemerdekaan dan berusaha melepaskan diri dari wilayah dan pemerintahan Thailand. Konflik berawal dari aksi protes yang dilakukan etnis Muslim Melayu terhadap pemerintah Thailand yang menganggap kebijakan-kebijakan pemerintah Thailand bersifat diskriminatif. Konflik ini juga dipicu oleh berbagai faktor lain yaitu faktor sosial, politik dan ekonomi.

Konflik yang terjadi di Thailand Selatan telah menjadikan stabilitas politik, ekonomi dan sosial Thailand terganggu. Kejadian tersebut juga memberikan citra negatif dari masyarakat internasional terhadap pemerintahan Thailand. Kebijakan pemerintah Thailand dalam merespon ketegangan yang terjadi di Thailand Selatan dan pelanggaran HAM yang terjadi pada tragedi Kru-Se dan Tak Bai mendapatkan sorotan dari dunia internasional dan pemerintah dianggap gagal dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Konflik Thailand Selatan sudah menarik perhatian dunia internasional, yaitu OKI sebagai organisasi kerjasama islam yang berfokus pada ham asasi manusia dan bertujuan untuk menjaga kelompok minoritas. Respon dari OKI disambut baik oleh kedua belah pihak yang bertikai sehingga dilakukannya berbagai negosiasi dengan Malaysia sebagai fasilitator dan mediator.

Hal ini menyebabkan pemerintah Thailand melakukan pendekatan dan strategi baru dalam menangani konflik di Thailand Selatan. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Thailand guna mengatasi peristiwa tersebut. Ada berbagai kebijakan yang

diambil, seperti kebijakan militer, politik dan ekonomi. Selain itu, Thailand juga berfokus kepada kebijakan sekuritisasi *speech act* yang bertujuan untuk mengkonstruksikan kepada masyarakat Thailand bahwa konflik separatis merupakan ancaman keamanan nasional. Bab selanjutnya akan membahas mengenai respon dan usaha pemerintah Thailand dalam mengatasi gerakan separatis di Thailand Selatan, dan juga analisis sekuritisasi pemerintah Thailand menggunakan metode *speech act*.